

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE**

**NUR AZIZAH IDRIS**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar sarjana ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIZAH IDRIS**  
**A011181009**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR AZIZAH IDRIS**

**A011181009**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 22 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abd. Hamid Padu, SE, MA, CRP.

NIP. 19590306 198503 1 002



Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA.,

CWM@.

NIP. 19651012 199903 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sanusi Fattan, SE., M.Si., CSF., CWM

NIP. 19690413 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR AZIZAH IDRIS**

**A011181009**





Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 5 Juli 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji


No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA CRP	Ketua	1..... 
2.	Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si, CPF	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®

NIP.19690413 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Azizah Idris

Nomor Pokok : A011181009

Program Studi : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Hasanuddin

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang menggunakan dengan cara melanggar Hak Cipta Pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Juli 2022

Yang menyatakan,



Nur Azizah Idris

A011181009

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone**” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuatkan bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambar dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut :

1. Allah SWT. Atas kehendak dan karunia-Nya memberikan kemudahan serta kelancaran pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua penulis yaitu Alm. Drs. H. Idris Rahim dan Dra. Hj. Wakiah HM, M.Si yang telah berhasil menjadi orang tua yang selalu mendidik penulis hingga saat ini. Terutama untuk Mama yang selama ini selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam segala hal dengan penuh rasa percaya dan rasa kasih sayang serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir. Terima kasih atas segala kepercayaan dan doa restu yang diberikan sehingga sehingga penulis bisa mencapai titik ini.
3. Saudara penulis yakni Riskiana Idris, SE.Sy dan M.Y.Khaerul Umam, S.H., M.H yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, yang selalu memberikan penulis bantuan dan masukan disaat penulis lagi memiliki kendala.
4. Keponakan penulis yaitu Ibrahim Nafii, Absyar Nafii dan Abiyan Nafi yang selalu membuat penulis semangat dalam mengerjakan tugas akhir dan selalu membuat penulis tertawa di saat lagi ada masalah.
5. Keluarga besar Maemunah Family yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis.

6. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA., CRP selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
7. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA. Selaku penguji I dan ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF. Selaku penguji II atas segala saran perbaikan dan pertanyaan-pertanyaan serta kritik yang membangun selama seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal-hal tersebut penulis banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu KEMA ILMU EKONOMI 2018 (LANTERN), terima kasih atas setiap momen kebersamaan selama perkuliahan yang terjalin baik suka maupun duka. Terima kasih telah berjalan bersama melewati seluruh rangkaian pengaderan secara bersama-sama hingga menjadi keluarga besar HIMAJIE.
10. Kepada SAHABAT KULIAH yaitu Dania, Tia, Dini, Adel, Yummi, dan Nabila, terima kasih penulis ucapkan untuk kalian yang selalu menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, terima kasih



sudah selalu ada untuk penulis dalam keadaan suka maupun duka, terima kasih sudah selalu membantu penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi, terima kasih sudah membuat masa perkuliahan penulis selama 4 tahun menjadi indah dan menyenangkan. Penulis merasa sangat bersyukur dan berterima kasih dapat dipertemukan dengan kalian.

11. Sahabat tercinta penulis yaitu Sari Andira Tahir dan Andi Yuni Annisa, terima kasih sudah selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, terima kasih sudah membantu dan menemani penulis dalam mencari data penelitian, terima kasih sudah selalu mendengarkan cerita penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir, terima kasih sudah selalu menemani penulis saat lagi jenuh, terima kasih sudah selalu ada Bersama penulis.

12. Kepada SAHABAT KOIN yaitu Sari, Asmud, Arifah, Nining dan Andin, terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis, terima kasih karena selalu menyemangati penulis pada saat ujian.

13. Kepada SAHABAT HIJRAH yaitu Opi, Nisrum, Nisuy, dan Risma terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

14. Kepada teman-teman KKN BONE 2 khususnya Posko 4 yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan KKN dan terima

kasih atas kenangan indah yang pernah dilalui bersama pada sataa KKN.

15. Kepada teman-teman penulis yakni Lia, Risma, dan Yuni terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis pada proses penulisan tugas akhir.
16. Kepada teman-teman penulis yakni Fitri, Qolbi dan Naskah, terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis.
17. Kepada pengurus HIMAJIE Periode 2021, terima kasih atas kepercayaan dan segala bentuk tanggung jawab serta permbelajarann yang telah diberikan kepada penulis.
18. Terakhir terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang hingga berada di titik ini, terima kasih sudah berhasil melewati berbagai rintangan, terima kasih sudah selalu kuat menghadapi segala hal.

Makassar, 25 Juli 2022



Nur Azizah Idris

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE**

Nur Azizah Idris

Abdul Hamid Paddu

Indraswati Tri Abdi Reviane

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan melalui Angkatan kerja di Kabupaten Bone. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan, variabel independen yang dilakukan adalah upah minimum dan indeks pembangunan manusia, adapun variabel intervening dalam penelitian ini yaitu Angkatan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan melalui Angkatan kerja, 2) indeks pembangunan manusia secara tidak langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui Angkatan kerja.

**Kata Kunci : *kemiskinan, Angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF POVERTY RATE IN BONE REGENCY**

Nur Azizah Idris

Abdul Hamid Paddu

Indraswati Tri Abdi Reviane

This study aims to examine and analyze the effect of the minimum wage and human development index on poverty through the workforce in Bone Regency. The analytical method used in this research is path analysis using secondary data. Data collection in this study is through annual data obtained from Badan Pusat Statistik. The dependent variable in this study is poverty, the independent variable is the minimum wage and the human development index, while the intervening variable in this study is the labor force. The results of this study indicate that, 1) the minimum wage has a negative and significant influence directly or indirectly on poverty through the labor force, 2) the human development index indirectly has a positive and significant effect on poverty through the labor force.

**Keywords:** *poverty, labor force, minimum wage, human development index*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teoritis .....	13
2.2 Studi Empiris .....	29
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	32
2.3.1 Hubungan Kemiskinan dan Tenaga Kerja.....	32
2.3.2 Hubungan Kemiskinan dan Upah Minimum .....	33
2.3.3 Hubungan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia .....	33
2.4 Hipotesis Penelitian .....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Metode Analisis Data.....	38
3.5 Definisi Operasional .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	42
4.2 Perkembangan Umum Variabel Penelitian .....	45
4.3 Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Kemiskinan Tertinggi di Sulses tahun 2015-2019 .....	3
Tabel 4.1 Hasil Penelitian .....	49
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolomogorov-Smirnov Test .....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin Watson .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bone tahun 2015-2019 .....	5
Gambar 1.2 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Bone tahun 2010-2019.....	7
Gambar 1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone tahun 2010-2019 .....	9
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	35
Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bone tahun 2005-2020.....	43
Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bone tahun 2005-2020.....	45
Gambar 4.3 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Bone tahun 2005-2020.....	46
Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone tahun 2005-2020 .....	48
Gambar 4.5 Kerangka Hasil Penelitian .....	50
Gambar 4.6 Grafik Scatterplot .....	54



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah yang utama dalam pembangunan ekonomi yang dialami oleh seluruh negara yang ada di dunia. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan menjadi hal yang sangat serius. Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan Kesehatan yang buruk, memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah. Secara singkat kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan serta Kesehatan.

Kemiskinan merupakan sebuah lingkaran setan yang tak berujung dan berkaitan dengan faktor satu dengan faktor lainnya. Pada saat seseorang dengan produksi rendah, maka pendapatan akan rendah pula, dengan begitu mereka akan masuk kedalam posisi yang dapat dikatakan kemiskinan. Dengan kemiskinan, maka konsumsi akan rendah dan apabila konsumsi rendah maka akan berdampak pada masalah Kesehatan dikarenakan adanya ketidakmpuan untuk membiayai pengobatan. Jika Kesehatan seseorang kurang baik maka akan Kembali berdampak pada produktifitas yang rendah.

Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks dalam bidang perekonomian. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kemiskinan maka akan berdampak munculnya masalah-masalah sosial di sekitar masyarakat. Salah satu contoh masalah yang dapat muncul dari adanya kemiskinan yaitu bertambahnya anak jalanan, meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi, serta akan meningkatkan kriminalitas. Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan mencapai 797,70 ribu jiwa. pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan hingga 807,03 ribu jiwa dan pada 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 813,70 ribu jiwa. Akan tetapi pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dari 792,64 ribu jiwa menjadi 767,80 ribu jiwa. Berdasarkan data perkabupaten, Kabupaten Bone menjadi jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah data mengenai 5 wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Selatan.

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Bone</b>	75,01	75,09	77,13	79,57	76,25
<b>Makassar</b>	63,24	66,78	68,19	66,22	65,12
<b>Gowa</b>	59,47	61,52	62,77	59,34	57,99
<b>Jeneponto</b>	53,87	55,32	55,34	55,95	54,05
<b>Pangkajene Kepulauan</b>	52,86	52,86	53,38	50,12	47,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

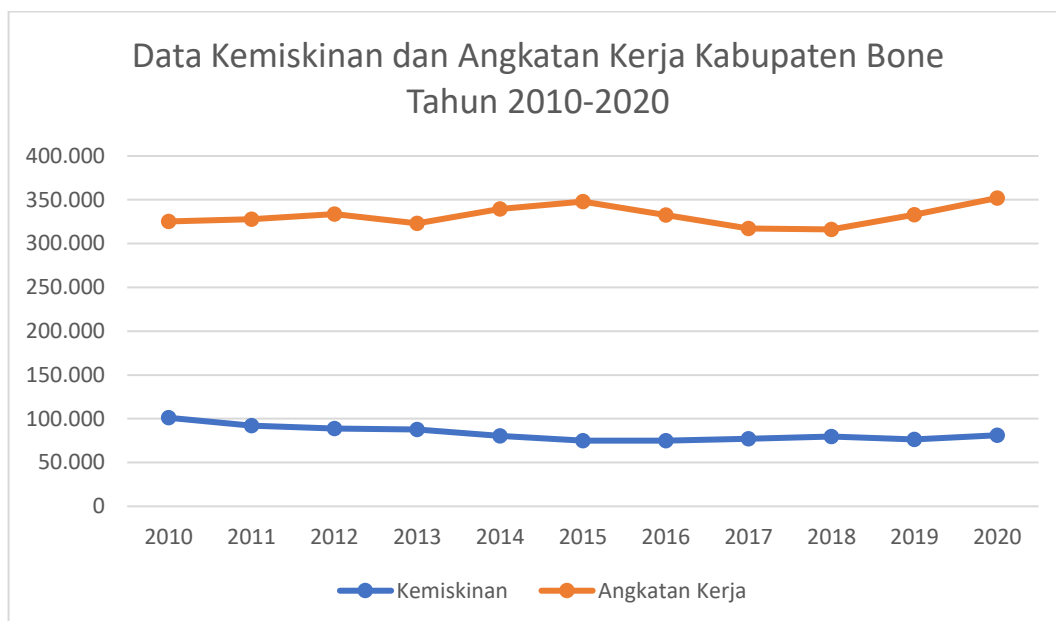
**Tabel 1.1 Wilayah Kemiskinan Tertinggi di Sulawesi Selatan Tahun  
2015-2019**

Tabel 1.1 menunjukkan 5 wilayah di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Berdasarkan data, Kabupaten Bone menjadi kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dan tertinggi di Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir. Setelah itu, posisi kedua ditempati oleh Kota Makassar dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2017 sebanyak 68,19 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten Pangkajene Kepulauan menempati posisi kelima dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 47,07 ribu jiwa pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone dari tahun 2010 hingga 2019 selalu mengalami penurunan. Meskipun selalu mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di kabupaten Bone tetap menjadi jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan. Pada

tahun 2015-2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone sebanyak 75,01 ribu jiwa dan pada tahun 2016 menjadi 75,09 ribu jiwa. Hal yang sama terjadi pada tahun 2017-2018, jumlah penduduk miskin yang mulanya berjumlah 77,13 ribu jiwa menjadi 79,57 ribu jiwa pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di kabupaten Bone mengalami penurunan hingga 76,25 ribu jiwa.

Salah satu penyebab dari adanya kemiskinan ini yaitu kurangnya tenaga kerja yang terserap. Tenaga kerja merupakan modal penting bagi geraknya roda pembangunan. Tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Todaro, penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tetap harus didukung dengan ketersediaan tenaga kerja. Pembangunan ketenagakerjaan perlu ditunjang dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

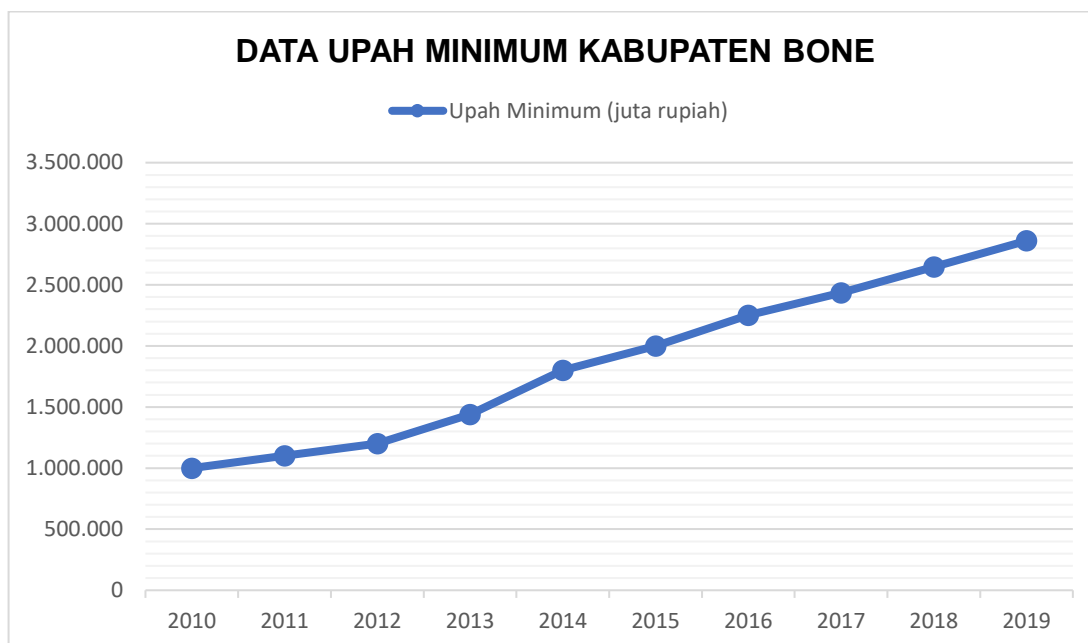
**Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan dan Angkatan Kerja di  
Kabupaten Bone Tahun 2010-2020**

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai jumlah penduduk miskin dan jumlah Angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bone dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Berdasarkan data yang ada diatas, jumlah Angkatan kerja di kabupaten Bone mengalami fluktuasi. Jumlah Angkatan kerja dari tahun 2010 hingga 2020 mengalami peningkatan sebesar 26.894 ribu jiwa. Angkatan kerja di Kabupaten Bone pernah mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, yang awalnya berjumlah 347.928 ribu jiwa menjadi 316.146 ribu jiwa pada tahun 2018, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 332.903 ribu jiwa.

Masalah ketenagakerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Simanjuntak (2001), salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

partisipasi angkatan kerja adalah tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam pasar kerja, maka semakin banyak orang yang tertarik masuk ke pasar tenaga kerja, namun sebaliknya apabila tingkat upah yang ditawarkan rendah maka orang yang termasuk usia angkatan kerja tidak tertarik untuk masuk ke pasar tenaga kerja dan lebih memilih untuk tidak bekerja atau lebih memilih masuk ke golongan bukan angkatan kerja.

Upah tenaga kerja memainkan peranan penting dalam ketenagakerjaan. Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenagakerjaan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, sedangkan jika tingkat upah yang ditawarkan rendah akan menyebabkan kualitas tenaga kerja yang kurang terlatih (Michael, 2004)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

**Gambar 1.2 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Bone Tahun  
2010-2019**

Selain itu, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh adanya masalah pengupahan. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti Kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah rendah yang diterima masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya upah minimum, maka akan mengangkat derajat penduduk yang berpendapatan rendah. Semakin meningkatnya upah minimum akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, upah minimum

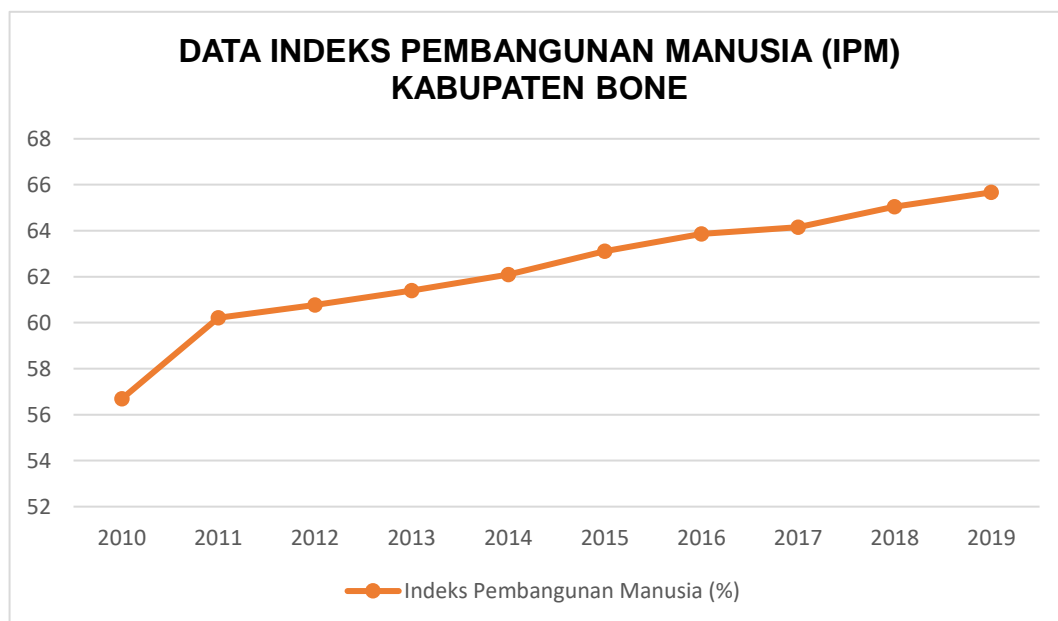
memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkatnya upah minimum dalam masyarakat, akan mengurangi kemiskinan yang ada. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reggi Irfan Pambudi, 2016 yang menyatakan bahwa upah minimum regional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, Adit Agus Prastyo, 2010 juga telah melakukan penelitian bahwa upah minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari penetapan upah minimum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pekerja, dengan adanya kenaikan tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain tingkat upah, indeks pembangunan manusia juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kualitas para tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas



dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat Pendidikan dan Kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat Pendidikan dan Kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

**Gambar 1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Bone Tahun 2010-2019**

Berdasarkan pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3, upah minimum dan indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan ini tidak diikuti dengan adanya peningkatan Angkatan Kerja dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin dan Angkatan kerja di Kabupaten Bone dari tahun 2010-2019 selalu mengalami fluktuasi sedangkan data IPM dan upah minimum di Kabupaten Bone dari tahun 2010-2019 mengalami tren peningkatan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada dimana jika terjadi peningkatan upah minimum seharusnya juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kualitas sumber daya manusia, yang dimana kualitas tersebut menunjukkan produktivitas, jika produktivitas rendah, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan. Jika pendapatan seseorang rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan meningkatkan kemiskinan.

Berdasarkan data yang ada di atas, maka penelitian ini hadir untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bone melalui Angkatan Kerja dengan judul “**Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah upah minimum secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kemiskinan melalui Angkatan Kerja di Kabupaten Bone ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kemiskinan melalui Angkatan Kerja di Kabupaten Bone ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum secara langsung atau tidak langsung terhadap kemiskinan melalui Angkatan Kerja di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui Angkatan Kerja di Kabupaten Bone.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah sebagai pihak pengambilan kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan yang tepat.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai aplikasi dari teori-teori yaitu ekonomi makro sehingga dapat menambah referensi untuk mengetahui secara teoritis mengenai kemiskinan.

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Kemiskinan adalah masalah nasional yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam teori kemiskinan dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953, yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga menyebabkan turunnya investasi masyarakat baik pada Pendidikan dan Kesehatan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang diterima di bawah minimum sehingga masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan dapat dipicu oleh rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selain itu proses penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang minim di Indonesia menyebabkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga kemiskinan menjadi tinggi.

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yaitu paradigma Neo Liberal dan paradigma Demokrasi sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian

masalah kemiskinan. Paradigma yang pertama yaitu Paradigma Neo-Liberal. Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapus kemiskinan. Bagi pendekatan ini strategi penganggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun Lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Adapun paradigma yang kedua yaitu Paradigma Demokrasi Sosial. Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-

sumber bagi potensi dirinya, seperti Pendidikan, Kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disinilah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untu dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional, misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun.

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata 'miskin' yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang

diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM).

World Bank mengartikan kemiskinan sebagai '*Poverty is to be hungry, to lack shelter and clothing, to be sick and not cared for, to be illiterate and not schooled.*' Kemiskinan berarti kelaparan, ketiadaan tempat tinggal dan pakaian, menjadi sakit dan tidak dirawat, buta huruf dan tidak sekolah. Dalam bentuk sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan. Bank Dunia menetapkan mereka yang disebut sebagai penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari \$5 per hari jika dikurs-kan dalam rupiah, rata-rata masyarakat yang masih memiliki pendapatan dalam kisaran Rp. 50.000, per hari. Jika standar ini ditetapkan di Indonesia maka jumlah penduduk miskin akan sangat banyak. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam menggolongkan kelompok miskin (Wahyuli, 2016).



Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasarnya berupa makanan, perumahan, Pendidikan, air bersih, Kesehatan, pekerjaan, pertanahan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, terbebas dari kriminalisme, dan hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial guna mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan Kesehatan yang buruk, memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni : tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada Pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, Kesehatan, perumahan dan Pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Pengukuran kemiskinan relatif didasarkan pada perbandingan pendapatan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah terhadap kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi. Artinya sebenarnya kelompok tersebut tidak miskin secara absolut, tetapi lebih miskin dibandingkan kelompok masyarakat lain yang kaya atau makmur. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan nasional yang diterima antara lapisan sosial dalam masyarakat. Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (Soedjatmoko, 1983).

Bentuk kemiskinan jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang disekitarnya. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu seperti seseorang atau masyarakat yang merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok ini tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Dengan ukuran absolut mereka miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau dikatakan miskin.

### **2.1.2 Tenaga Kerja**

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan Angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat

benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Angkatan kerja menurut model Solow merupakan satu komponen penting dalam fungsi produksi yang kualitasnya berhubungan dengan tenaga kerja, seperti keterampilan, pengalaman, dan Pendidikan pekerja. Perubahan dalam komposisi angkatan kerja telah memperlambat pertumbuhan produktivitas ekonomi. Misalnya seseorang yang baru masuk angkatan kerja biasanya kurang produktif, efisiensi karena mempunyai keterampilan yang lebih rendah dan pengalaman bekerja yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang sudah berpengalaman dalam Angkatan kerja selama proporsi pekerja baru ini tidak akan mempengaruhi rata-rata produktivitas mereka. Selain itu, bekerja juga merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh, atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi (Nasution, 2018).

Menurut Sudarsono (1991), tenaga kerja merupakan manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi yang meliputi keadaan fisik jasmani, keahlian-keahlian, kemampuan untuk berfikir yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif (berusia 15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus pekerjaan rumah tangga atau lainnya selain pekerjaan pribadi.

Menurut Simanjuntak (1985), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Banyaknya tenaga kerja yang menawarkan diri dalam membantu proses produksi, tergantung pada banyaknya penyediaan atau supply tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat. Jumlah orang yang menawarkan diri menjadi tenaga kerja tersebut terbagi menjadi 3 golongan yaitu orang yang telah bekerja, orang yang siap bekerja, serta orang yang sedang mencari pekerjaan. Keadaan ini sering disebut angkatan kerja atau *Labour Force*, sedangkan *Total Labour Force* merupakan konsep angkatan kerja secara menyeluruh. Konsep total Labour Force ini merumuskan jumlah

keseluruhan dari angkatan kerja yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun.

### **2.1.3 Upah Minimum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upah diartikan sebagai bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil sebagai akibat dari pekerjaan. Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang

akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Teori David Ricardo menyatakan bahwa besarnya tingkat upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pada kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Upah dalam teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Teori ekonomi tidak membedakan diantara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada pekerja) disebut dengan upah. Para ekonom cenderung melihat penghasilan tenaga kerja pada upah riil rata-rata yaitu upah menunjukkan kekuatan daya beli persatu jam kerja, dengan kata lain upah nominal atau upah uang dibagi dengan biaya hidup. Dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency wage*). Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah efisiensi, yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi (Mankew) yang dikutip dalam Mar'atus Soimah (2017). Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih

produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.

Teori upah menurut Karl Marx, sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem pekeronomian tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua yaitu (1) Menurut Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dan pelaksanaan berdasarkan pandangan Karl Marx dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama adalah kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang jumlahnya hampir sama, pada nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira-kira sama, yang kedua adalah sistem pengupahan memberikan insentif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional, dan yang ketiga adalah sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar-benar mau bekerja menurut kemampuannya.

Teori upah menurut Pertambahan Produk Marginal, teori ini menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor produksi yang dipergunakan untuk menerima diberikan imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa



sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut.

Sedangkan teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan oleh tenaga kerja, artinya pada teori ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawannya.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Berdasarkan peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama.

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi Pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya (dikutip dalam Devyanti Patta, 2012). Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Todaro dan Smith (2011), Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui Pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*)

untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang Kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang Pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak. Indikator pertama mengukur 'umur panjang dan sehat', indikator kedua mengukur 'pengetahuan dan keterampilan', sedangkan indikator ketiga mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan IPM.

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai "*a process of enlarging people's choices*" atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang

dan hidup sehat, tingkat Pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*) (Nadila, 2020).

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu Kesehatan, tingkat Pendidikan dan indikator ekonomi. Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai saran penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100 maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting diantaranya yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar, dan menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

## **2.2 Studi Empiris**

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dan Sakina (2019) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi.” Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan Angkatan kerja. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan. Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi, dan Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Robiansyah (2015) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan dengan Pendapatan Perkapita sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara)”. Variabel

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan Angkatan kerja, dan tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan penyerapan Angkatan kerja berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Demikian pula pendapatan per kapita selain berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan juga memoderasi pengaruh penyerapan Angkatan kerja terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reggi Irfan Pambudi (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. Variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah masyarakat miskin sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, upah minimum regional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Verana Billa Dyah Permatasari (2019) dengan judul penelitian ‘Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2017’. Variabel independent yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan upah minimum. Variabel dependen yang

digunakan yaitu kemiskinan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Jawa Timur. 2) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Jawa Timur. 3) Pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Jawa Timur. 4) Upah minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Salsabilla, Indri Arrafi, dan Nunuk Triwahyuningtyas (2022) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kemiskinan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 3) upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 4) penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2.3 Kerangka Pikir Penelitian**

### **2.3.1 Hubungan Kemiskinan dan Tenaga Kerja**

Menurut Solow, kenaikan jumlah penduduk akan menurunkan atau menyebabkan standar hidup semakin rendah. Jika Angkatan kerja mengalami pertumbuhan yang pesat maka akan meningkatkan standar kehidupan yang baik, tetapi jika Angkatan kerja lemah akan mengakibatkan pendapatan menurun yang membuat standar kehidupan turun dan membuat miskin karena kekurangan modal untuk hidup maupun kerja.

Tenaga kerja merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut Todaro (2011) investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan menjadi meningkat apabila tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia kerja. Apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.



Penyerapan tenaga kerja diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

### **2.3.2 Hubungan Kemiskinan dan Upah Minimum**

Kebijakan upah minimum merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan upah minimum dibuat dengan tujuan untuk melindungi para pekerja agar upah yang diterima sesuai dengan kebutuhan hidup minimum para pekerja tersebut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Menurut Nurkse, upah yang rendah di bawah minimum akan mempengaruhi tabungan, jika tidak ada tabungan maka akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan ada yang tidak mencukupi untuk biaya hidup sehingga menimbulkan kemiskinan.

### **2.3.3 Hubungan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia**

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum

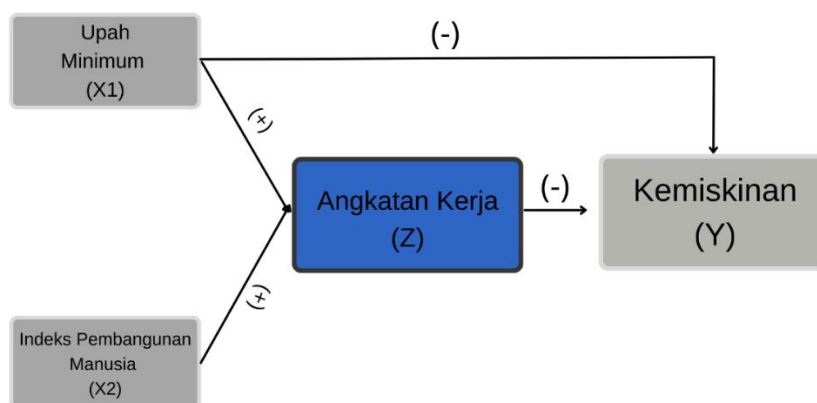
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesejahteraan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang yang miskin. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan manusia (human capital), peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh indikator Kesehatan dan pendapatan. Jika seseorang tidak memiliki banyak pendapatan maka akan berpengaruh terhadap kemampuan konsumsi yang rendah. Jika konsumsi rendah maka dapat membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara layak. Hal ini juga akan berdampak pada buruknya Kesehatan atau status gizi seseorang. Seseorang dengan status gizi yang buruk tidak akan punya tenaga yang kuat untuk bekerja, akhirnya produktivitas kerjanya akan buruk. Produktivitas kerja yang rendah maka akan berpengaruh terhadap penghasilan dan akan meningkatkan kemiskinan.

Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup Panjang umur dan hidup sehat, untuk

mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat Kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Hal ini juga menunjukkan bahwa rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan dalam model paradigma seperti gambar di bawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upah minimum diduga memiliki pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan melalui Angkatan kerja di Kabupaten Bone.
2. Indeks Pembangunan Manusia diduga memiliki pengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui Angkatan kerja di Kabupaten Bone.